

Original Article

Analisis Kebijakan Lintas Sektor dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Yuyu Nengsih¹, Irma Herliana²

^{1,2}Program Studi Keperawatan, Universitas Indonesia Maju
Jln. Harapan nomor 50, Lenteng Agung-Jakarta Selatan 12610

Email: yuyu.kunaifi@gmail.com

Editor: Wawan Kurniawan

Diterima: 30/05/2022

Direview: 18/06/2022

Publish: 29/06/2022

Available Article: (doi)

Hak Cipta:

©2022 Artikel ini memiliki akses terbuka dan dapat didistribusikan berdasarkan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons, yang memungkinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi yang tidak dibatasi dalam media apa pun, asalkan nama penulis dan sumber asli disertakan. Karya ini dilisensikan di bawah **Lisensi Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International**.

Abstract

Latar Belakang: Dampak pandemi Covid-19 meliputi ketakutan, kekhawatiran, melemahnya hubungan sosial, perubahan dan ekonomi, anggapan terhadap pasien yang selamat sehingga ditolak masyarakat, timbulnya kemungkinan amarah dan permusuhan masyarakat ke negara, kecenderungan rasa ketidakpercayaan atas informasi. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan menurunkan TNI-POLRI turut serta membantu dan mengamankan kondisi ini dengan cara turut serta menangani korban positif corona di tempat-tempat yang sudah dialihfungsikan pemerintah.

Tujuan: Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran analisis kebijakan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan positivisme. Objek dalam penelitian adalah Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 900.45-201 Tahun 2020 dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor: 47 Tahun 2020. Informan dalam penelitian terdiri dari Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Camat, Kepala Puskesmas dan Lurah. Tempat penelitian di salah satu wilayah yang berada di Kota Bogor. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara semi terstruktur. Observasi Analisa data berupa *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing*.

Hasil: Implementasi kebijakan menurut informan bahwa tingkat kelurahan melaksanakan kebijakan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya seperti Puskesmas, Babinsa, Bimas, satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan unsur non pemerintah, seperti RW, RT, kader, UPD Pakuan. Dalam SK Gugus Tugas dan RW Siaga Covid-19, tertera uraian tugas dari pihak-pihak yang tertera di susunan SK tersebut. Tingkat Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan bekerja sama dengan Lurah, Camat, kader, RT, RW dan tokoh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sangat gencar dilakukan, setiap hari melaksanakan promosi kesehatan ke masyarakat, selain kegiatan yang rutin dilakukan

Kesimpulan: Implementasi dan evaluasi kebijakan melibatkan empat lintas sektor. Output kebijakan yaitu lintas sektor telah melakukan pelaksanaan PSBB dengan baik.

Kata Kunci: covid-19, kebijakan, lintas sektor

Pendahuluan

World Health Organization (WHO), pada 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 dapat dikategorikan sebagai pandemi karena virus tersebut sudah menyebar di seluruh dunia. Menurut data *World Health Organization* (WHO) dan *Public Health Emergency Operating Center* Kemenkes, kasus konfirmasi Covid-19 global sampai dengan 6 Mei 2020 yaitu 3.588.773 orang dengan 247.503 kematian di 214 negara terjangkit.¹ Asia Tenggara dan Asia Selatan dan Indonesia menjadi negara dengan kasus Covid-19 tertinggi ke-2 setelah India, yaitu dengan jumlah konfirmasi Covid-19 sebanyak 12.438 orang dengan jumlah kematian 895 orang.²

Inter Agency Standing Committee (2020) menjelaskan bahwa dampak pandemi Covid-19 meliputi ketakutan, kekhawatiran, melemahnya hubungan sosial, perubahan dan ekonomi, anggapan terhadap pasien yang selamat sehingga ditolak masyarakat, timbulnya kemungkinan amarah dan permusuhan masyarakat ke negara, kecenderungan rasa ketidakpercayaan atas informasi dari pemerintah dan sumber lain, kecenderungan kambuhnya kasus kejiwaan dan penyalahgunaan obat serta dampak negatif lain karena orang menghindari tempat pelayanan kesehatan atau tidak dapat menjangkau tenaga kesehatan.³ Stigma dan diskriminasi di masyarakat yang berkaitan Covid-19, misalnya terhadap orang-orang yang pernah terjangkit, keluarganya dan tenaga kesehatan dan petugas garis depan lainnya yang pernah merawat. Stigmatisasi terhadap orang yang menangani pasien Covid-19 dan jenazahnya.⁴

Selain masalah psikologis dan psikososial, manajemen risiko dari pneumonia jenis baru di Wuhan ini menimbulkan banyak masalah lain. Menyebarnya virus dari orang ke orang dapat berdampak besar pada masyarakat, antara lain timbulnya kepanikan umum, berkurangnya pasokan medis dan makanan, tempat tidur dan staf medis yang tidak mencukupi, serta terjadinya perpindahan penduduk yang cepat dalam jumlah besar ke tempat lain.⁵ *World Health Organization* (WHO) menginstruksikan kepada Indonesia untuk mendeteksi kasus-kasus yang ada, meminta keterbukaan kondisi corona di negara Indonesia dan menyarankan agar meningkatkan mekanisme respon darurat, contohnya dengan mendeklarasikan situasi darurat nasional serta pemerintah dituntut dapat mendidik masyarakat, berkomunikasi secara aktif dan lebih banyak melibatkan komunitas.⁶

Upaya-upaya kesehatan global harus diterapkan untuk mengatasi stres psikososial, khususnya yang berkaitan dengan isolasi/karantina, ketakutan dan kerentanan di antara populasi umum.³ Beberapa langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan ahli trauma dari akademisi dan praktik harus berperan penting dalam krisis ini, karena mereka memiliki basis pengetahuan untuk memberikan dukungan dan perawatan di saat sekarang dan masa depan.⁷

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah saat ini dengan menurunkan prajurit TNI-Polri turut serta membantu dan mengamankan kondisi ini dengan cara turut serta menangani korban positif corona di tempat-tempat yang sudah dialihfungsikan Pemerintah seperti wisma atlet dijadikan untuk penampungan korban terinfeksi Covid-19 yang besar, kemudian sosialisasi ke rakyat agar tidak berkumpul di tempat publik agar memutus mata rantai sebaran virus, serta dipersiapkan pengambilan obat ke negara lain dan membawanya ke Indonesia. Hal paling mendesak adalah menyiapkan satu pulau terisolasi lengkap dengan rumah sakit, tenaga medis/ relawan/ TNI serta kuburan massal bagi korban meninggal, hal ini diharapkan agar meminimalisir penyebaran lebih banyak lagi ke masyarakat dan berakibat pada psikis bangsa.⁸

Indonesia sudah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk menangani Covid-19 dan akibat dari wabah ini. diantaranya adalah Keppres No: 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, Perpu No: 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona dan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.⁹ Kota Bogor memiliki kebijakan-kebijakan dalam mencegah penyebaran dan penanganan Covid-19. Beberapa kebijakan tersebut antara lain Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 900.45-201 Tahun 2020 tentang Gugus Depan Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB di Kota Bogor.¹⁰

Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran analisis kebijakan lintas sektoral dalam pencegahan dan penanganan Covid-19 di wilayah Puskesmas Bogor Tengah

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan positivisme karena peneliti harus obyektif dan netral dalam mengukur aspek kehidupan sosial, memeriksa bukti dan memperhatikan penelitian lainnya. Pendekatan tersebut untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fakta-fakta sosial yang ada dengan menggunakan alur berfikir deduktif.

Objek dalam penelitian adalah Keputusan Wali Kota Bogor Nomor: 900.45-201 Tahun 2020 tentang Gugus Depan Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Kota Bogor dan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor: 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Informan dalam penelitian terdiri dari Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah, Camat, Kepala Puskesmas dan Lurah. Tempat penelitian di salah satu wilayah yang berada di Kota Bogor, Jawa Barat.

Alat pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, wawancara semi terstruktur dan observasi. Tahapan pengolahan data diawali dengan penjelajahan secara umum, mereduksi data dan menguraikan fokus data. Analisa data berupa data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing*.

Hasil

Penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama tentang hal yang mempengaruhi didapatkan bahwa kondisi lingkungan tidak ada politik praktis yang di anut petugas karena Aparatur Sipil Negara netral. Sudah adanya struktur kebijakan yang melekat pada struktur organisasi kelurahan Cibogor, dan untuk program sudah ada Surat Keputusan. Kerjasama petugas sebagai bentuk solusi dari kurangnya SDM. Keragaman petugas dan masyarakat di wilayah yang masih bisa sejalan dengan kebijakan, komunikasi yang terjalin dengan baik, peran serta aktif dari penerima dan pelaksana program serta infrastruktur yang cukup.

Hubungan antar organisasi berjalan baik, di mana sudah ada kejelasan konsistensi dan komunikasi antar instansi yang terlibat program. Adanya SK Lurah dalam Tim Detektif Covid, uraian tugas dan buku Pedoman RW Siaga Covid-19. Jejaring yang terlibat program dirasakan sangat efektif. Sumber daya organisasi untuk implementasi program sudah cukup baik. Adanya

dukungan pemimpin pusat dan lokal dan komitmen birokrasi yang terlibat program. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana sangat baik, dimana petugas yang terlibat program memiliki kemampuan teknis dan manajerial, adanya koordinasi dan kontrol, adanya dukungan dari instansi terkait, komunikasi internal yang terbuka, hubungan antar pihak pemerintah dan non pemerintah berjalan baik, serta kedudukan Lurah berada di bawah Camat, jadi dituntut adanya koordinasi dan kontrol secara birokrasi.

Implementasi kebijakan menurut informan bahwa tingkat kelurahan melaksanakan kebijakan dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah lainnya seperti Puskesmas, Babinsa, Bimas, satpol PP, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan unsur non pemerintah, seperti RW, RT, kader, UPD Pakuan. Dalam SK Gugus Tugas dan RW Siaga Covid-19, tertera uraian tugas dari pihak-pihak yang tertera di susunan SK tersebut. Tingkat Puskesmas melaksanakan kebijakan dengan bekerja sama dengan Lurah, Camat, kader, RT, RW dan tokoh masyarakat. Kegiatan-kegiatan sangat gencar dilakukan, setiap hari melaksanakan promosi kesehatan ke masyarakat, selain kegiatan yang rutin dilakukan. Evaluasi pelaksanaan kebijakan menurut informan bahwa Hasil evaluasi implementasi dari lintas sektoral di atas, pelaksanaan PSBB disesuaikan dengan Peraturan Walikota yang berlaku dan terlibat aktifnya ke empat lintas sektoral tersebut dalam kegiatan, laporan, monitoring dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap wilayah.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kebijakan

Hal-hal yang mempengaruhi penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 diidentifikasi yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Menurut Ateng Syafrudin dalam Mutiarin dan Zainudin (2014), jelas terlihat bahwa Lintas sektoral tersebut melaksanakan kebijakan secara desentralisasi, yaitu pengakuan dari penentu kebijaksanaan pemerintahan negara terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di berbagai daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah melakukan upaya dalam mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 bertujuan untuk melindungi Seluruh warga negara Indonesia. Langkah-langkah yang diambil umumnya ditujukan kepada setiap individu agar sadar bahwa penyebaran Covid-19 merupakan masalah yang sangat kompleks karena dapat menghambat hampir seluruh aktivitas manusia yang umumnya lebih banyak melakukan interaksi dengan manusia lainnya dan tentunya mempermudah penyebaran virus.¹¹

Pada pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan Penanganan Covid-19 oleh lintas sektoral dilakukan secara bersama-sama, melibatkan mitra kelurahan, yaitu RT, RW, kader tokoh masyarakat, Babinsa, Bimas, Satpol PP, Dinas Pendidikan, UPD Pakuan, Dinas Perhubungan, dan instansi lainnya.

Implementasi

Adanya tindak lanjut dari Perwali Kota Bogor Nomor 45 berupa kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada isi kebijakan tersebut. Ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan langsung oleh lintas sektor seperti menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan di rumah, tempat/fasilitas umum tempat ibadah.

Pelaksanaan kebijakan mengikat semua jajaran kelurahan, puskesmas dan Kecamatan. Hal ini merupakan bukti bahwa model pelaksanaan implementasi *Top down* sangat efektif dan terjadi di birokrasi, khususnya instansi pemerintah, dimana pelaksanaan dipandang sebagai produk dari manajemen birokrasi yang kuat, yang melibatkan kontrol, pemaksaan dan kepatuhan untuk mencapai tujuan.¹²

Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan di Puskesmas Bogor Tengah, seperti wawar (kampanye masif ke masyarakat), penerapan protokol kesehatan dalam pelayanan Poli umum, Poli Gigi, pemeriksaan Lansia, dal kegiatan lainnya.

Evaluasi

Hasil evaluasi implementasi dari lintas sektoral di atas, pelaksanaan PSBB disesuaikan dengan PerWali yang berlaku dan terlibat aktifnya ke empat lintas sektoral tersebut dalam kegiatan Tim Detektif Covid-19 dan Gugus Tugas, pembuatan dan penyampaian laporan tertulis ataupun via WA Grup, monitoring dan evaluasi Tim yang terlibat dan masyarakat sudah dilakukan. Kebijakan Pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19 melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.¹³ Laporan evaluasi implementasi penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Output

Lintas sektoral yang terdiri dari beberapa Kelurahan, Kepala Puskesmas dan Camat telah melakukan pelaksanaan PSBB dengan baik, dengan jumlah kasus 1 dan sebaran 1. Kebijakan pembatasan sosial kerap diterapkan dalam menahan laju persebaran Covid-19. Berbagai kota dan negara memiliki variasi dalam menerapkan hal ini, dari yang bersifat lunak (masih ada berbagai aktivitas di tempat umum) sampai yang bersifat ketat.¹⁴

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan terdiri dari kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi dan kemampuan agen pelaksana. Implementasi dan evaluasi kebijakan melibatkan empat lintas sektor. Output kebijakan yaitu lintas sektor telah melakukan pelaksanaan PSBB dengan baik.

Konflik Kepentingan

Peneliti menyatakan bahwa penelitian ini independen dari konflik kepentingan individu dan organisasi

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat pada penelitian ini, terutama kepada responden penelitian.

Pendanaan

Sumber pendanaan diperoleh dari penulis.

References

1. Nasution L. Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global. *J Adalah Bul Huk dan Keadilan*. 2020;4:20–1.
2. Nuryanti S. Peran Masyarakat Untuk bela Negara Dalam Menghadapi Covid-19. *SSRN Electron J*. 2020;
3. Torales J, O’Higgins M, Castaldelli-Maia JM, Ventriglio A. The outbreak of COVID-19 coronavirus and its impact on global mental health. *Int J Soc Psychiatry*. 2020;66(4):317–20.
4. IASC. Catatan Tentang Aspek Kesehatan Jiwa dan Psikososial Wabah Covid. *Iasc*. 2020;(Feb):1–20.
5. Yue X-G, Shao X-F, Li R, Crabbe M, Mi L, Hu S, et al. Risk Management Analysis for Novel Coronavirus in Wuhan, China. *J Risk Financ Manag*. 2020;13(2):22.
6. Indriya I. Konsep Tafakkur Dalam Alquran Dalam Menyikapi Coronavirus Covid-19. *SALAM J Sos dan Budaya Syar-i*. 2020;7(3).
7. McAleer M. Prevention Is Better Than the Cure: Risk Management of COVID-19. *J Risk Financ Manag*. 2020;13(3):46.
8. Wadi R. Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penanganan Covid-19. *SALAM J Sos dan Budaya Syar-i*. 2020;7(5).
9. Kemenkes.RI. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. 2020.
10. Perwali. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor: 30 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penangan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Bogor. 2020AD.
11. Siahaan C, Adrian D. Komunikasi Dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada Kebijakan Vaksin Covid-19). *Kinesik*. 2021;8(2):158–67.
12. Ayuningtyas D. Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi. Depok: RajaGrafindo Persada; 2018.
13. Tiara Dewi, Muhammad Amir Masruhim RS. Optimalisasi Strategi Polmas Guna mendukung Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19. *J Yustita*. 2021;(April):5–24.
14. Khairu Nissa N, Nugraha Y, Finola CF, Ernesto A, Kanggrawan JI, Suherman AL. Evaluasi Berbasis Data: Kebijakan Pembatasan Mobilitas Publik dalam Mitigasi Persebaran COVID-19 di Jakarta. *J Sist Cerdas*. 2020;3(2):84–94.